



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 8591 0031 (*Hunting*), Faksimile: (021) 8591 0030
email: humas@bpkp.go.id, website: www.bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LKIN-588/SU04/3/2022 1 Juli 2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan
Komunikasi Triwulan II Tahun 2022

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi
Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki **empat** sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan **empat** indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022, target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Kegiatan			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1 Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,16	N/A	N/A
2 Meningkatkan Reputasi BPKP	1 Indeks Reputasi BPKP	Skala 1-100	74	N/A	N/A

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Kegiatan			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5	6=5/4
3	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	1	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Skala 1-100	71	N/A	N/A
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	1	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Skala 1-10	8,7	N/A	N/A

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 3,16.

Pada triwulan II Tahun 2022, Kementerian PAN-RB belum melaksanakan penilaian reformasi birokrasi BPKP sehingga “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” belum dapat disajikan nilainya (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA REPUTASI BPKP

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan

ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat aspek yang terdiri dari aspek Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat aspek tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator variabel yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut: 1. *Bad* – 2. *Poor* – 3. *Sufficient* – 4. *Neutral* – 5. *Good* – 6. *Excellent* – 7. *Superior*.

Pada tahun 2022, target Indeks Reputasi BPKP adalah 74 dari skala 100 atau 5,18 dari skala 7. Pengukuran Indeks Reputasi BPKP baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II Tahun 2022 (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 3: PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERSELESAIKAN

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II Tahun 2022 (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 4: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari IKK “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 8,7. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II Tahun 2022 (*Not Available*).

CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 sebanyak empat indikator *output* kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Output Kegiatan
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	<i>Output</i> 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	8	53,33%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	18	60%
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Dokumen	101 ¹⁾	91	90,9%
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	31	20	64,52%

Keterangan:

¹⁾ Menggunakan target tahun 2021

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IOK 1 "Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan" diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan triwulan II, realisasi *output* telah mencapai 8 Kegiatan atau mencapai 53,33% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundangan-undangan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I
- b) Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2021
- c) Penyusunan Analisis dan Deskripsi peraturan perundang-undangan I
- d) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP I
- e) Evaluasi pengelolaan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I

- f) Abstrak peraturan perundang-undangan I
 - g) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU I
 - h) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan I
2. IOK 2 “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.
- Sampai dengan triwulan II, realisasi *output* telah mencapai 18 Kegiatan atau mencapai 60% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
- a) Pendapat hukum terkait peraturan yang digunakan dalam menentukan tingkat solvabilitas PT ASABRI
 - b) Pendapat hukum terkait klaim atas proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi engineering, procurement, construction and commissioning (EPCC) pengembangan dan modernisasi PG assembagoes situbondo.
 - c) Pendapat hukum terkait penugasan revidu atas perhitungan hak dan kewajiban atas pengakhiran perjanjian kerja sama aset tetap berupa tanah di lokasi Jl. RE Martadinata/Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara pada PT PLN (Persero)
 - d) Pendapat hukum terkait pengangkatan ke dalam JFA
 - e) Pendapat hukum terkait pelaksanaan jual beli aset gedung dan tanah PT Rekayasa Industri di Kalibata
 - f) Penanganan perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang
 - g) Penanganan perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang
 - h) Penanganan perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang
 - i) Penanganan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Smd di PN Sumedang
 - j) Pendapat hukum terkait perhitungan piutang pokok, nilai tambah dan denda dalam rangka penyelesaian piutang Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
 - k) Pendapat hukum terkait rencana revidu *business plan* dan kompensasi atas penyelenggaraan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) jalan tol KM 19 Jalur B ruas tol Jakarta-Cikampek
 - l) Pendapat hukum terkait potensi gugatan hukum atas laporan hasil pemeriksaan PNBPN pada proyek palapa ring Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - m) Pendapat hukum terkait penerapan skema *passthrough* dalam pengusaha pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur
 - n) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 003/II/KIP-JIB/PSI/2022 di Komisi Informasi Provinsi Jambi
 - o) Penanganan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN/S.md di PN Sumedang
 - p) Penanganan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Smd di PN Sumedang
 - q) Penanganan perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Lbo di Limboto
 - r) Pendampingan pemberian keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta
3. IOK 3 “Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan” diukur dari jumlah dokumen permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Sampai dengan triwulan II, realisasi *output* telah mencapai 91 kegiatan atau mencapai 90,9% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Berkas pembelaan di persidangan

1. Duplik Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 4 Januari 2022
2. Duplik Perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 4 Januari 2022
3. Daftar Bukti Perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 4 Januari 2022
4. Daftar Bukti Perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 4 Januari 2022
5. Daftar Bukti Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 4 Januari 2022
6. Jawaban Perkara 58/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 6 Januari 2022
7. Duplik Perkara 44/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 6 Januari 2022
8. Daftar Bukti Perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 11 Januari 2022
9. Daftar Bukti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 11 Januari 2022
10. Daftar Bukti Tambahan Perkara 41/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 12 Januari 2022
11. Jawaban Perkara No 35/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 13 Januari 2022
12. Jawaban Perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 13 Januari 2022
13. Daftar Bukti Perkara 46/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 18 Januari 2022
14. Daftar Bukti Tambahan Perkara 50/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 19 Januari 2022
15. Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 19 Januari 2022
16. Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 19 Januari 2022
17. Daftar Bukti Tambahan Perkara 39/Pdt.G/2021/PN.Smd tanggal 20 Januari 2022
18. Daftar Bukti Perkara 44/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 20 Januari 2022
19. Daftar Bukti Tambahan Perkara 51/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 20 Januari 2022
20. Daftar Bukti Tambahan Perkara 52/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 20 Januari 2022
21. Daftar Bukti Tambahan Perkara 55/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 20 Januari 2022
22. Kontra Memori Banding Perkara 264/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Januari 2022

23. Jawaban Perkara Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 26 Januari 2022
24. Kesimpulan Perkara 39/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 27 Januari 2022
25. Duplik Perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 27 Januari 2022
26. Duplik Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 27 Januari 2022
27. Kesimpulan Perkara 51/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 27 Januari 2022
28. Kesimpulan Perkara 44/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 27 Januari 2022
29. SKK Perkara 3/Pdt.G/2022/PN. Bks a.n. Kaper BPKP Jabar tanggal 2 Februari 2022
30. SKK Perkara 3/Pdt.G/2022/PN. Bks a.n Tuti tanggal 2 Februari 2022
31. SKK Perkara 3/Pdt.G/2022/PN. Bks a.n Kaper dan Tuti tanggal 2 Februari 2022
32. SKK Perkara 1/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 2 Februari 2022
33. SKK Perkara 3/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 2 Februari 2022
34. Kesimpulan Perkara 40/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 2 Februari 2022
35. Kesimpulan Perkara 41/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 2 Februari 2022
36. Kesimpulan Perkara 52/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 3 Februari 2022
37. Daftar Bukti Perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 3 Februari 2022
38. Daftar Bukti Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 3 Februari 2022
39. Kesimpulan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PN. Smd tanggal 3 Februari 2022
40. Duplik Perkara No. 35/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 3 Februari 2022
41. Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 9 Februari 2022
42. Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN. Smd tanggal 9 Februari 2022
43. Duplik Perkara No. 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 9 Februari 2022
44. Kesimpulan Perkara No. 47/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2022
45. Kesimpulan Perkara No. 53/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2022
46. Daftar Bukti Perkara 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 23 Februari 2022
47. Memori PK Perkara No. 48/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 25 Februari 2022
48. Jawaban BPKP dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 9 Maret 2022

49. Duplik BPKP dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 23 Maret 2022
50. Kesimpulan dalam Perkara No. 46/Pdt.G/2021/PN.Smd tanggal 23 April 2022
51. Daftar Tambahan Alat Bukti Surat dalam Perkara No. 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Maret 2022
52. Keterangan Tertulis Termohon dalam Perkara Sengkata Informasi Publik No. 003/II/KIP-JBI/PSI/2022 tanggal 30 Maret 2022
53. Daftar Alat Bukti Surat dari Termohon dala Perkara No. 003/II/KIP-JBI/PSI/2022 tanggal 30 Maret 2022
54. Kontra Memori Banding Turut Terbanding II (BPKP) dalam Perkara No. 267/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2022
55. Kesimpulan BPKP dalam Perkara No. 58/Pdt.G/2021/PN.Smd tanggal 6 April 2022
56. Daftar Alat Bukti Surat dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 6 April 2022
57. Kesimpulan BPKP dalam Perkara No. 63/Pdt.G/2021/PN.Smd tanggal 7 April 2022
58. Jawaban BPKP dalam Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 13 April 2022
59. Daftar Bukti Tambahan BPKP dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 13 April 2022
60. Kesimpulan BPKP dalam Perkara 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 April 2022
61. SKK Perkara 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg tanggal 25 April 2022
62. Kesimpulan BPKP dalam Perkara 3/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 27 April 2022
63. Duplik BPKP dalam Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 11 Mei 2022
64. Daftar Bukti BPKP dalam Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 18 Mei 2022
65. Kesimpulan BPKP dalam Perkara 35/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 25 Mei 2022
66. Kesimpulan BPKP dalam Perkara 1/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 25 Mei 2022
67. Memori Banding dalam Perkara No. 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 6 Juni 2022
68. Kontra Memori Banding dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022

69. Jawaban Turut Terlawan Tersita II dalam Perkara Perlawanan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg tanggal 27 Juni 2022.

b) Pendapat hukum

1. Pendapat Hukum terkait Peraturan yang Digunakan dalam Menentukan Tingkat Solvabilitas PT ASABRI, Surat No: S-18/SU04/2/2022 tanggal 5 Januari 2022
2. Pendapat Hukum atas Permintaan Verifikasi Biaya Modifikasi oleh BUP Proyek KPBU SPAM Umbulan, Surat No: S-80/SU04/2/2022 tanggal 24 Januari 2022
3. Pendapat Hukum terkait Klaim atas Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) Pengembangan dan Modernisasi PG Assembagoes Situbondo, Surat No: S-92/SU04/2/2022 tanggal 28 Januari 2022
4. Pendapat Hukum terkait Permohonan Izin Penghapusan Aset Tetap KDP pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Surat No: S-93/SU04/2/2022 tanggal 28 Januari 2022
5. Masukan atas Konsep Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Pengolah Data bagi Auditor BPKP untuk Mendukung Transformasi Digital BPKP, Surat No: S-116/SU04/2/2022 tanggal 7 Februari 2022
6. Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BPKP, Surat No: SR-118/SU04/2/2022, tanggal 7 Februari 2022
7. Pendapat Hukum terkait Permasalahan dalam Penugasan Reviu atas Jenis Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien COVID-19 yang Diberikan oleh RSPP Extension Simprug Periode 1 Januari 2021 s.d. 18 Mei 2021, Surat No: S-126/SU04/2/2022 tanggal 9 Februari 2022
8. Telaah atas Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Surat No: S-234/SU04/2/2022, tanggal 18 Maret 2022
9. Pendapat Hukum terkait Penugasan Reviu atas Perhitungan Hak dan Kewajiban atas Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Aset Tetap Berupa Tanah di Lokasi Jl. RE Martadinata/Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara pada PT PLN (Persero), Surat No: S-249/SU04/2/2022, tanggal 21 Maret 2022
10. Pendapat Hukum terkait Pengangkatan ke dalam JFA, Surat No: 250/SU04/2/2022 tanggal 21 Maret 2022
11. Pendapat Hukum terkait Rencana Pelaksanaan Jual Beli Aset Gedung dan Tanah PT Rekayasa Industri di Kalibata, Surat No: S-281/SU04/2/2022, tanggal 30 Maret 2022
12. Pendapat Hukum terkait Perhitungan Piutang Pokok, Nilai Tambah dan Denda dalam rangka Penyelesaian Piutang Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Surat No: R-292/SU04/2/2022, tanggal 1 April 2022
13. Pendapat Hukum terkait Rencana Review Business Plan dan Kompensasi atas Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol KM

- 19 Jalur B Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Surat No: HK.03/R-324/SU04/2/2022, tanggal 11 April 2022
14. Pendapat Hukum terkait Potensi Gugatan Hukum Atas Laporan Hasil Pemeriksaan PNBPN Pada Proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Informatika, Surat No: HK.03/R/S-349/SU04/2/2022, tanggal 18 April 2022
 15. Pendapat Hukum terkait Penerapan Skema Passthrough dalam Pengusahaan Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Surat No : HK.03/R/S-372/SU04/2/2022, tanggal 22 April 2022
 16. Pendapat Hukum terkait Kewenangan BPKP dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pencapaian Pekerjaan dan Kewajaran Harga atas Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek, Surat No: HK.03/R/S-472/SU04/2/2022, tanggal 3 Juni 2022
 17. Pendapat Hukum terkait Pengawasan Penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2022, Surat No: HK.03/R/S-532/SU04/2/2022, tanggal 13 Juni 2022
 18. Pendapat Hukum terkait Atensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Bupati Tangerang mengenai Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penyediaan Air Bersih antara PERUMDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang dengan PT Lippo Karawaci Tbk, Surat No: HK.03/R/S-555/SU04/2/2022, tanggal 17 Juni 2022
 19. Pendapat hukum dalam proses karena permintaan pada akhir periode TW II
 20. Pendapat hukum dalam proses karena permintaan pada akhir periode TW II
 21. Pendapat hukum dalam proses karena permintaan pada akhir periode TW II
 22. Pendapat hukum dalam proses karena permintaan pada akhir periode TW II
4. IOK 4 "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi" diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan.

Sampai dengan triwulan II, realisasi *output* telah mencapai 20 Kegiatan atau mencapai 64,5% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Januari 2022
- b) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2022
- c) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2022
- d) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2022
- e) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Februari 2022
- f) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2022
- g) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Maret 2022
- h) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2022
- i) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2022
- j) Laporan monitoring pengelolaan website BPKP Triwulan I Tahun 2022
- k) Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan I Tahun 2022
- l) Laporan berita harian BPKP bulan April 2022
- m) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan April 2022
- n) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan April 2022

- o) Laporan berita harian BPKP bulan Mei 2022
- p) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik Mei 2022
- q) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Mei 2022
- r) Laporan berita harian BPKP bulan Juni 2022
- s) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik Juni 2022
- t) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juni 2022

B. PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Penggunaan Dana

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Penggunaan Dana Sampai Dengan Triwulan II 2022

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	431.200.000	172.601.689	40,02%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	699.408.000	256.955.154	36,74%
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan			
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	892.062.000	382.681.879	42,90%
Jumlah		2.022.670.000	812.238.722	40,15%

Berdasarkan data tabel di atas, realisasi anggaran Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar Rp812.238.722 atau 40,15% dari target.

2. Penggunaan SDM

Realisasi penggunaan SDM untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Penggunaan SDM Sampai Dengan Triwulan II 2022

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi SDM (OH)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2.635	1.318	50,01%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2.756	1.980	71,84%
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan			

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi SDM (OH)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.874	2.437	50%
	Jumlah	10.265	5.735	55,87%

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, SDM yang telah dialokasikan untuk mencapai target *output* adalah 5.735 OH dari target tahun 2022 10.265 atau 55,87%.

C. KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang telah diuraikan di atas, di tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

1. *Gold Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Cetak (majalah Warta Pengawasan edisi 4/2021) dari PR Indonesia tahun 2022.
2. *Silver Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Eri Satriana

Tembusan Yth.:
Sekretaris Utama BPKP (sebagai laporan)